



TANDA TERIMA

No.5396/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2026

Kepada Yth,
PT BPR SRI PARTHA BALI
Jalan Mohamad Yamin No 7 Denpasar

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2025 dari PT BPR SRI PARTHA BALI dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 17 April 2026

PERBARINDO



TANDA TERIMA

No.5396/GCG/Media-BPR/IV/2026

Kepada Yth,
PT BPR SRI PARTHA BALI
Jalan Mohamad Yamin No 7 Denpasar

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2025 dari PT BPR SRI PARTHA BALI dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 17 April 2026

MediaBPR-PERBARINDO



BPR SRI PARTHA

No. : 042/BPR.SP/IV.01/2026

Lamp : 1 Bendel

Kepada Yth :

DPP Perbarindo dan MediaBPR

Komplek PATRA II No.46

Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass Cempaka Putih

Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4261445/6

Perihal : Laporan Transparansi PT BPR Sri Partha Bali Tahun 2025

Dengan hormat,

Menunjuk POJK No 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, berikut kami kirimkan Laporan Transparansi BPR Sri Partha Bali Tahun 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 17 April 2026
PT BPR Sri Partha Bali



I Made Suardika, SH
Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisaris.
2. Arsip.

Jl. Prof. Mohamad Yamin No. 7 Denpasar – Bali 80226
Telp. 0361-4746844, Faks. 0361-4722270
Email : sripartha_bank@yahoo.com

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Sri Partha Bali

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039674-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601046-17042026102553

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

sripartha_bank@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-17 10:25:53



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**PT BPR SRI PARTHA BALI
TAHUN 2025**



**Jl. Prof Moh Yamin No 7 Denpasar
TELEPON: 0361 4746844**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR Sri Partha Bali
Alamat	Jln. Prof Moh Yamin No 7 Renon - Denpasar
Nomor Telepon	(0361) 4746844

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Sri Partha Bali pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Sri Partha Bali memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Sri Partha Bali dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Denpasar. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Sri Partha Bali didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Sri Partha Bali.

BPR Sri Partha Bali telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Sri Partha Bali selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Sri Partha Bali terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan

dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	I Made Suardika SH
	Jabatan	Direktur Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama:

- a. Bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang -undangan yang berlaku
- b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank
- c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai
- g. Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengkomunikasikannya secara efektif.
- h. Memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
- i. Memastikan Bank memiliki Kebijakan Strategi Anti Fraud dan memastikan penerapan SAF berjalan dengan efektif.
- j. Memastikan penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank
- k. Bertanggungjawab atas keputusan pelaksanaan ketentuan peraturan OJK

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional bank
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan /peraturan yang berlaku
- d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak covid-19 sudah dilaksanakan
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sesuai dateline
- f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing

- g. penerapan APUPPT PPPSPM telah dilaksanakan dimasing - masing bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h. Memastikan Bank memiliki Kebijakan Strategi Anti Fraud dan memastikan penerapan SAF berjalan dengan efektif.
- i. Memastikan penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank
- j. Bertanggungjawab atas keputusan pelaksanaan ketentuan peraturan OJK

Nihil

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Jabatan	Komisaris Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
<p>Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen. b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. d. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR. e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya. f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran. g. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. h. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR i. Memberikan persetujuan , pengawasan , dan mengevaluasi kebijakan prosedur penerapan program APUPPT dan PPPSPM j. Memastikan Bank memiliki kebijakan Strategi Anti Fraud dan memastikan penerapan SAF berjalan dengan efektif k. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur Pengendalian Internal dalam proses pelaporan keuangan Bank l. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggungjawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 		
2.	Nama	Ida Ayu Puspawati SE

Jabatan

Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direski serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.
- e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.
- g. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
- h. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR
- i. Memberikan persetujuan, pengawasan, dan mengevaluasi kebijakan prosedur penerapan program APUPPT dan PPPSPM
- j. Memastikan Bank memiliki kebijakan Strategi Anti Fraud dan memastikan penerapan SAF berjalan dengan efektif
- k. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur Pengendalian Internal dalam proses pelaporan keuangan Bank
- l. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggungjawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara Konsisten dan Penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan kredit
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan
- d. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindak lanjuti sesuai dateline yang ditentukan
- e. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan, dan dicontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang
- f. Memastikan terlaksananya penerapan APUPPT terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nihil

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

PT BPR Sri Partha Bali tidak membentuk komite karena modal inti dibawah 50M

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

PT BPR Sri Partha Bali tidak membentuk komite karena modal inti dibawah 50M

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Made Suardika, SH
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Persentase Kepemilikan (%)	40,00
2.	Nama	Ida Ayu Puspawati SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Komisaris Utama memiliki saham 40% di PT BPR Sri Partha Bali

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I Made Suardika SH
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Ida Ayu Puspawati SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan pemegang Saham pada kelompok usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Ashi
	Persentase Kepemilikan (%)	40,00
2.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Pusaka
	Persentase Kepemilikan (%)	40,00
3.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Antenk
	Persentase Kepemilikan (%)	37,50
4.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA

Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Tish
Persentase Kepemilikan (%)	20,00

Komisaris Utama memiliki saham di 4 BPR lainnya yang masih 1 Group dengan BPR Sri Partha Bali

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Made Suardika SH
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada
2.	Nama	Ida Ayu Puspawati SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
----	------	--------------------------------

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Nyoman Dhasmiartha MBA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Ni Wayan Yuniartha SE MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
4.	Nama	I Wayan Gatha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham di PT BPR Sri Partha Bali

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Made Suardika SH
-----------	------	---------------------------

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Nyoman Dhasmiartha MBA - Adik Kandung, Ni Wayan Yuniartha SEMM - Kakak Kandung, I Wayan Gatha - Orang Tua Kandung
2.	Nama	Ida Ayu Puspawati SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Nyoman Dhasmiartha MBA - Adik Kandung, Ni Wayan Yuniartha SEMM - Kakak Kandung, I Wayan Gatha - Orang Tua Kandung
2.	Nama	I Nyoman Dhasmiartha MBA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada

	Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Kakak Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Kakak Kandung, Ni Wayan Yuniartha SE MM - Kakak Kandung, I Wayan Gatha - Orang Tua Kandung
3.	Nama	Ni Wayan Yuniartha SE MM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Adik Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Adik Kandung, I Nyoman Dhasmiartha MBA - Adik Kandung, I Wayan Gatha - Orang Tua Kandung
4.	Nama	I Wayan Gatha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Anak Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Anak Kandung, I Nyoman Dhasmiartha MBA - Anak Kandung, Ni Wayan Yuniartha SE MM - Anak Kandung

Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR dan Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya

11. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp268.857.600
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp320.445.450

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	1 orang
--	----------------

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi	2 orang

Kesehatan (Orang)	
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Direksi dan Dewan Komisaris hanya memiliki paket remunerasi berupa Gaji yang didalamnya sudah termasuk Dakes.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,15 : 1
-------------	-----------------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,87 : 1
-------------	-----------------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,22 : 1
-------------	-----------------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,27 : 1
-------------	-----------------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) **2,53 : 1**

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	04 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Penyampaian hasil kerja sampai dengan Maret 2025 dan Pembahasan tindak lanjut hasil exit meeting dengan OJK dan KAP		
2.	Tanggal Rapat	02 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Evaluasi hasil kerja sampai dengan juni 2025 dan saran dari Dewan Komisaris		
3.	Tanggal Rapat	05 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Evaluasi hasil kerja sampai dengan juli 2025 dan saran dari Dewan Komisaris		
4.	Tanggal Rapat	02 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Evaluasi hasil kerja sampai dengan agustus 2025 dan saran dari Dewan Komisaris		
5.	Tanggal Rapat	06 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Penyampaian kinerja sampai September 2025 , Penerapan Kebijakan APU PPT dan PPPSPM dan saran dari Dewan Komisaris		
6.	Tanggal Rapat	03 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Evaluasi hasil kerja sampai dengan November 2025 dan saran dari Dewan Komisaris		

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan 6 kali dalam setahun

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Made Meiarthayasa MBA
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ida Ayu Puspawati SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Anggota Dewan Komisaris selalu hadir dan tepat waktu saat pelaksanaan rapat

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus

Hukum Pada Tahun Laporan

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Tidak ada penyimpangan internal (Fraud) yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	----------------

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi sepanjang tahun 2025

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang Tahun 2025 di BPR Sri Partha Bali tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	14 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Gunung Lebah
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	21 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pecalang Desa Sumerta
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Hari Raya Nyepi
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	11 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Alas Arum
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	03 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Batur dan Besakih
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000

5.	Tanggal Pelaksanaan	09 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Pembelian Kupon Bazaar Penggalian Dana Perbaikan Pura
	Jumlah (Rp)	Rp400.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	13 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia di Pura Khayangan Desa Sumerta
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia di Pura Dalam Sumerta
	Jumlah (Rp)	Rp350.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	26 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Penyelenggara
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Sponsor Festival Seni dan Budaya
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	10 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Ds Tanjung Bungkak
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk Desa Tanjung Bungkak
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	08 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Penyelenggara

	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan partisipasi HUT PPAU Th 2025
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	16 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Penyelenggara
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk Bencana Banjir
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	02 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Penyelenggara
	Penjelasan Kegiatan	Pembelian Kupon Bazaar Br. Ketapean Kaja
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	08 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia di Pura Bukit Mentik
	Jumlah (Rp)	Rp750.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	29 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Puncak Mangu
	Jumlah (Rp)	Rp750.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	30 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Dalem Balingkang
	Jumlah (Rp)	Rp750.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	12 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Pura Dalem Sumerta
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
17.	Tanggal Pelaksanaan	11 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Uluwatu
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
18.	Tanggal Pelaksanaan	24 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ketua Yayasan
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan ke yayasan Dharma Jati
	Jumlah (Rp)	Rp2.400.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	24 Februari 2026
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ketua Yayasan
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan ke yayasan Tat Twam Asi
	Jumlah (Rp)	Rp2.400.000
20.	Tanggal Pelaksanaan	30 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Sakenan
	Jumlah (Rp)	Rp100.000

PT BPR Sri Partha Bali menyediakan dana CSR untuk kegiatan sosial

PT BPR SRI PARTHA BALI

Jl. Prof Moh Yamin No 7 Denpasar

Telepon: 0361 4746844

Website: www.bprsripartha.com, Email: sripartha_bank@yahoo.com

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR SRI PARTHA BALI untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 16 April 2025

PT BPR SRI PARTHA BALI



I Made Suardika,SH
Direktur Utama



I Made Meiarthayasa, MBA
Komisaris Utama